

**LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
STASIUN PPMHKP PALU**

SEMESTER I TAHUN 2026



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN PALU
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Kami mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya sehingga kegiatan keterbukaan informasi publik Semester I Tahun 2026 ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Pelaksanaan kegiatan monev ini bertujuan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan keterbukaan informasi publik serta membuat rekomendasi yang diberlakukan agar keberlangsungan kegiatan berjalan secara optimal

Hasil monitoring tersebut menjadi bahan evaluasi atas keberlangsungan kegiatan bagi peningkatan kinerja organisasi. Tak lupa kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan pada Stasiun PPMHKP Palu.

Kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat, terutama dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pada Stasiun PPMHKP Palu. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dalam menyempurnakan laporan ini.

Palu, 22 Juni 2026

Kepala,



Ditandatangani
Secara Elektronik

M.Roy Pahlavi

BAB I.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Implementasi undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap satker layanan publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap satker layanan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah yang penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi satker layanan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali, selain itu keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting terbentuknya Negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintahan telah mengesahkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Era keterbukaan yang mengiringi reformasi tahun 1998 semakin menimbulkan kesadaran akan terbukanya akses informasi dari berbagai kalangan. Secara khusus, keterbukaan akses menuju informasi publik diperlukan oleh mereka yang berkecimpung dalam bidang

lingkungan, gerakan anti korupsi, hak asasi manusia, dan pers yang sering mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai informasi dari lembaga pemerintah, dengan dalih rahasia Negara. Pemerintah harus menyiapkan skill sarana prasarana, sumber daya manusia yang punya kemampuan (skill) dan kemauan serta komitmen dari seluruh penyelenggara pemerintahan atau satker layanan publik dan aparat atau komponennya, untuk memberikan informasi yang mudah, cepat dan akurat.

B. TUJUAN

Evaluasi Keterbukaan Informasi Stasiun PPMHKP Palu ditujukan untuk mengetahui aktifitas dan efektifitas kebijakan keterbukaan informasi publik Stasiun PPMHKP Palu.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Tujuan

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Stasiun PPMHKP Palu adalah (1) Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik; (2) Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Prinsip

Prinsip pelayanan informasi publik Stasiun PPMHKP Palu meliputi: Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana; Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu; penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Informasi Publik

Jenis informasi publik di lingkungan Stasiun PPMHKP Palu meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

Fungsi PPID

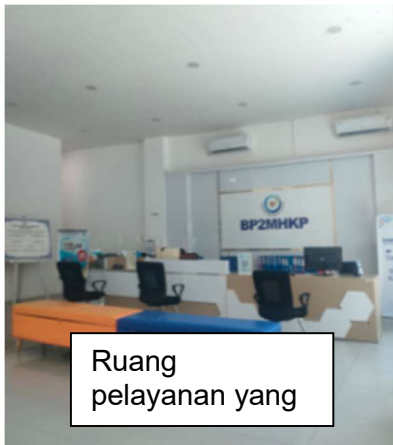
- Menentukan informasi kepada PPID pemilik informasi dalam hal informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon tidak dikuasai oleh PPID Stasiun PPMHKP Palu
- Menyediakan dan mengamankan informasi publik di Stasiun PPMHKP Palu
- Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana
- Melakukan koordinasi dengan PPID kementerian dan PPID unit pelaksana teknis di lingkungan wilayah kerjanya terkait dengan penyelesaian sengketa informasi publik
- Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- Melakukan penghitaman atau pengaburan materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya
- Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Stasiun PPMHKP Palu
- Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik
- Menggunakan sistem informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik
- Melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitas perangkat PPID
- Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan informasi publik
- Mengoordinasikan :
 - 1) Menyampaikan informasi publik dalam bahasa indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami.
 - 2) Pemenuhan permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik.
 - 3) Pengklasifikasi informasi publik dan / atau pengubahan pengklasifikasi informasi publik
 - 4) Permohonan keberatan diproses berdasarkan prosedur.

D. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
- b. Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. SK Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2024, tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- e. PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- f. PerKI I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

E. SARANA PRASARANA

Fasilitas layanan informasi yang tersedia pada Stasiun PPMHKP Palu terdiri dari :



BAB II.

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksana

Petugas pelaksana monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Stasiun PPMHKP Palu adalah team Penata Laksanaan Stasiun PPMHKP Palu.

2. Waktu

Monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di BPPMHKP Palu Periode Januari hingga Juni tahun 2026 untuk informasi yang diberikan setiap saat.

3. Hasil Pelaksanaan

A. Aktivitas / Frekuensi Analitik Media Sosial

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dapat dilihat dari aktifitas penyampaian informasi yang diberikan setiap saat yaitu terkait kegiatan Stasiun PPMHKP Palu sehari-hari dalam pelaksanaan tupoksi. Jenis informasi yang diberikan setiap saat oleh BPPMHKP Palu diinformasikan melalui media social milik Stasiun PPMHKP Palu yaitu Instagram, Facebook, Twitter. Aktifitas / frekuensi penyiapan informasi tahun 2024 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 1. Data Postingan Twitter Stasiun PPMHKP Palu Semester I Tahun 2026

No	Media Sosial	Jumlah Postingan
		Total
1	Twitter (BKIPMPalu)	12 postingan

Tabel 2. Data Postingan Facebook Stasiun PPMHKP Palu Semester I tahun 2025

No	Media Sosial	Jumlah Postingan
		Total
1	Facebook. (page : Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu)	14 posting

Tabel 3. Data Postingan Instagram Stasiun PPMHKP Palu Semester i tahun 2025

No	Media Sosial	Jumlah Postingan
		Total
1	Instagram (badanmutukkp_palu)	28 posting

B. permohonan Informasi

Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi diwebsite dan pengajuan permohonan informasi melalui aplikasi PPID, pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik dengan tetap diarahkan dengan bimbingan langsung dari Petugas PPID. Demikian juga pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui media sosial langsung direspon oleh petugas PPID secara Online.

Periode Semester I tahun 2026

Pada periode waktu Januari hingga Juni 2026 terdapat 2 (dua) permintaan informasi. Permintaan informasi masing-masing dilakukan oleh pelaku usaha perikanan budidaya (informasi tentang prosedur CBIB) sebanyak 1 informasi, serta permintaan informasi dari dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah (Informasi tentang data ekspor) sebanyak 1 informasi.

**REKAPAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PADASTASIUN PPMHKP
PALU PERIODE JANUARI-JUNI TAHUN 2026**

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data		Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian	Bentuk Informasi		
			Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online
1	Januari	1	0	-	-	-	-	-	-
2	Februari	0	0	-	-	-	-	-	-
3	Maret	0	0	-	-	-	-	-	-
4	April	1	1	-	-	2 Hari	✓	-	-
5	Mei	1	1	-	-	4 Hari	-	-	✓
6	Juni	-	0	-	-	-	-	-	-

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik Stasiun PPMHKP Palu telah dilaksanakan pada Semester I Tahun 2026 merupakan informasi yang diberikan setiap saat pada media social twitter, website PPID , Instagram, website PPID , Facebook. Pada Semester I Tahun 2026. Stasiun PPMHKP Palu Palu telah melaksanakan postingan foto maupun video pada twitter Instagram, Facebook, tentang pelayanan mutu produk perikanan ini juga sebagai bentuk pemberian informasi kepada masyarakat. Kemudian Tim PPID Stasiun PPMHKP Palu Palu juga telah membuat Matrik rekap permohonan Informasi Publik PPID dan menyelesaikan seluruh permohonan informasinya.

B. KENDALA

- Permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon yang tidak dilengkapi dengan data dukung yang dipersyaratkan dalam permohonan informasi publik masih sering terjadi. Hal tersebut diakibatkan karena keterbatasan pemahaman tentang persyaratan permohonan informasi.

C. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Stasiun PPMHKP Palu telah menyampaikan Keterbukaan informasi di media social twitter, Instagram, website PPID, Facebook, secara umum sudah berjalan dengan baik, namun perlu diadakannya Sosialisasi tentang Pedoman Pengelolaan Informasi kepada pelaku usaha perikanan. Selain itu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik pada Stasiun PPMHKP Palu agar standar layanan informasi diimplementasikan dengan baik.

BAB IV. PENUTUP

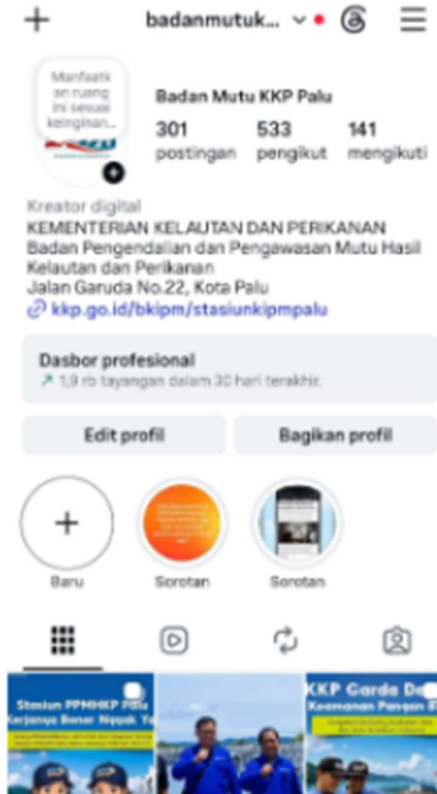
Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Stasiun PPMHKP Palu semester I Tahun 2026 ini disampaikan sebagai masukan dan bahan evaluasi sebagai masukan dan bahan evaluasi serta penyempurnaan Keterbukaan Informasi Publik, sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara maksimal sebagai panduan praktis dan efisien yang bermuara pada peningkatan kinerja organisasi.

LAMPIRAN

1. Screenshot Media Sosial



Medsos : X (twitter)

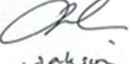


Medsos : Instagram



Medsos : Page Facebook

2. bukti permintaan informasi

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK		PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALU		STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALU	
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK			
Nomor pendaftaran(disi petugas) : 003 / PIP-PPID / IV / 2016			
Nama	: Uti Ari Baharwan, S.Pi	Nama	: JAKSON
NIK	: 7271036603920007	NIK	:
Alamat	: BTN Palu Blok V 2A No. 8 Palu	Alamat	: Sam. Mina Bulara Jl. Kargalutun, Bulaka Bule, Bde. Bja
Pekerjaan	: PPK	Pekerjaan	: Wiraswasta / penangkapan ikan
Institusi	: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi	Institusi	:
Nomor Telp/E-mail	: 0822 5919 8049	Nomor Telp/E-mail	: 0812 2053 2555
Informasi yang dibutuhkan	: Data Ekspor	Informasi yang dibutuhkan	: Prosedur @sra dan Aktivasi Nib
Tujuan Penggunaan Informasi	: Ketersediaan Laporan	Tujuan Penggunaan Informasi	: Sebaran @sra
Cara Memperoleh Informasi	☐ Mencatat/melihat/mendengar/membaca	Cara Memperoleh Informasi	☒ Mencatat/melihat/mendengar/membaca
	☐ Salinan Hard copy		☐ Salinan Hard copy
/ File soft copy Cara mendapatkan salinan : ☐		/ File soft copy Cara mendapatkan salinan : ☐	
Mengambil langsung	☒ E-Mail	Mengambil langsung	☐ E-Mail
	☐ Jasa pengiriman		☐ Jasa pengiriman
	☐ Lainnya		☐ Lainnya
Palu, tanggal (04) bulan (05) Tahun (2016)		Palu, tanggal (13) bulan (04) Tahun (2016)	
Pemohon Informasi permohonan	Petugas penerima	Pemohon Informasi permohonan	Petugas penerima
 (Uti Ari Baharwan)	 (Istikomah)	 (JAKSON)	 (Mantau)